

PERSAMAAN KEBIJAKAN EKONOMI RENCANA 5 TAHUN PERTAMACINA DAN KEBIJAKAN EKONOMI ALIBABA (1953- 1955)

Asna Ariz Kawanti¹, Henry Susanto², Marzius Insani³

Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung
Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung, Indonesia

*Corresponding-e-mail: asnaariz03@yahoo.com

Received: November 20th, 2021 Accepted: December 7th, 2021 Online Published: Desember 14th, 2021

ABSTRAK

Persamaan Kebijakan Ekonomi Rencana 5 Tahun Pertama Cina Dan Kebijakan Ekonomi Alibaba (1953-1955). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persamaan antara kebijakan ekonomi Alibaba pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo 1 dan kebijakan Rencana 5 Tahun Pertama Cina. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat persamaan antara kebijakan ekonomi Alibaba dan kebijakan ekonomi Rencana 5 Tahun Pertama Cina. Persamaan yang diteliti yaitu pada ekonomi sektor pertanian dan industri menengah. Di bidang pertanian Cina membuat pertanian yang lebih modern untuk kemajuan sistem pertanian negaranya, hal ini juga dilakukan pada kabinet Alibaba yaitu dengan modernisasi sistem pertanian di Indonesia. Di bidang industri perusahaan-perusahaan di Cina diberikan pinjaman kredit lisensi untuk menasionalisasikan perindustrian di negara Cina. Selain itu pengadaaan pajak dan sistem pemerintahan yang bersentral ke pusat mempermudah pemerintah dalam mengatur proses nasionalisasi perekonomian di Cina. Di Indonesia hal ini juga terjadi pada kebijakan Alibaba yang menekankan pada nasionalisasi perindustrian di Indonesia. Hal ini dilakukan karena di Indonesia banyak terdapat pengusaha-pengusaha Tionghoa yang memiliki perusahaan dan dapat menguasai sistem perekonomian di Indonesia.

Kata Kunci: Alibaba, Cina, Ekonomi, Kebijakan

ABSTRACT

The Similarities of China's First 5-Year Plan of Economic Policy and Alibaba's Economic Policy (1953-1955). The study aims to analyze the similarities between Alibaba's economic policies during Ali Sastroamidjojo 1's Cabinet and China's First 5-Year Plan policy. The research methods used in this research are historical methods. The results showed that there are similarities between Alibaba's economic policies and the economic policies of China's First 5-Year Plan. The equation is examined in the economic of the agricultural sector and medium-sized industries. In the field of agriculture China makes agriculture more modern for the advancement of the country's agricultural system, this is also done in the Alibaba cabinet, namely by modernizing the agricultural system in Indonesia. In the industrial field, companies in China are given license credit loans to nationalize industry in China. In addition, the procurement of taxes and a central government system makes it easier for the government to regulate the process of nationalization of the economy in China. In Indonesia this is also the case with Alibaba's policy which emphasizes the nationalization of industry in Indonesia. This is done because in Indonesia there are many Chinese entrepreneurs who have companies and can master the economic system in Indonesia.

Keywords: Alibaba, China, Economy, Policy

I. PENDAHULUAN

Indonesia memasuki masa demokrasi Liberal mulai dari pengakuan kedaulatan Indonesia. Masa demokrasi Liberal berlaku antara tahun 1949-1959, ditandai dengan tumbuh suburnya partai politik dan berlakunya kabinet parlementer. Demokrasi Liberal di Indonesia ditandai oleh prestasi politik dan kemelut politik. Prestasi politik berupa pemberlakuan sistem multipartai dan penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Kemelut politik berupa kabinet yang silih berganti dan perdebatan berkepanjangan dalam konstituante (Setiawan, 2018).

Indonesia telah kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tanggal 1 Agustus 1950, langsung dihadapkan oleh beberapa masalah penting, termasuk masalah ekonomi. Jatuhnya nilai rupiah dan merosotnya kegiatan ekspor telah meningkatkan laju inflasi dan krisis devisa yang terus berlanjut, bahkan semakin memuncak pada tahun 1954. Sementara itu, pengeluaran pemerintah untuk kegiatan non pembangunan cukup besar (Sejarah Bank Indonesia, 2005).

Pada Anggaran belanja tahun 1949, beberapa corak yang khusus bagi anggaran kolonial atau setengah kolonial tampak jelas dengan jelas pada anggaran tahun 1950-1951, yaitu:

Sebagian besar dari pendapatan negara diperoleh dari hasil pemungutan pajak-pajak. Sebagian besar dari pendapatan ini dipergunakan untuk keperluan administrasi Pemerintah Sipil, untuk keperluan ketentaraan, kepolisian, penjara, dan pengadilan. Sebagian dari pendapatan negara dipakai untuk membayar pinjaman dari luar negeri beserta dengan bunganya. Hanya sebagian yang sangat kecil saja dari pendapatan negara digunakan untuk memenuhi kebutuhan materiil dan kulturil dari Rakyat kita. Tempat-tempat yang penting dalam lapangan keuangan dikuasai sepenuhnya oleh perusahaan-perusahaan bank-bank modal asing. Adanya defisit atau kekurangan anggaran belanja yang menimbulkan tekanan-tekanan inflasi yang luar biasa dan Tekanan-tekanan deflasi sebagai akibat dari pada politik masa ontslag semakin meluaskan pengangguran dan kemiskinan (Sakirman, 1954).

Posisi devisa mulai memburuk sejak pertengahan tahun 1951 yaitu pada masa kabinet Wilopo. Posisi tersebut terus berlanjut dan mencapai puncaknya pada bulan April-Mei 1954. Untuk memperbaiki posisi cadangan devisa, pemerintah menempuh beberapa kebijakan yang terfokus pada penggalakan kegiatan ekspor dengan memberikan kemudahan kepada beberapa eksportir. Pemerintah juga melakukan pembatasan impor secara kuantitatif pada pertengahan tahun 1954 dan tahun-tahun berikutnya. Pembatasan impor ini dilaksanakan, antara lain, dengan cara mempertinggi pungutan-pungutan tambahan atas impor (Sejarah Bank Indonesia, 2005).

Proses nasionalisme dari DJB mungkin menjadi satu hal yang ditunggu pada tahun ini, mengingat Indonesia harus segera mengatur sistem moneter negaranya, terutama peredaran uang yang bisa saja menyebabkan inflasi. Peran penting dari bank sirkulasi sangatlah vital untuk kelangsungan perekonomian negara.

Pemerintah memiliki tanggungan menasionalisasikan De Javasche Bank dan kemungkinan nasionalisasi ini terjadi pada April 1952. Pada tanggal 15 Desember 1951 dikeluarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 1951 tentang Nasionalisasi De Javasche Bank. Ini adalah salah satu hal yang ditunggu karena keluarnya undang-undang ini merupakan titik yang pasti mengenai nasionalisasi De Javasche Bank. Namun, muncul juga himbauan-himbau untuk melakukan nasionalisasi DJB secara hati-hati agar tidak menimbulkan pertentangan lagi dengan pihak Belanda. Pada akhir

tahun 1952, muncul pernyataan De Javasche Bank akan berganti menjadi Bank Indonesia.

Latar belakang munculnya pernyataan ini mungkin berdasarkan pada UUD 1945 yang disusun oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang menyebutkan bahwa ada bank bernama Bank Indonesia yang akan menjadi badan pengatur peredaran uang di Indonesia. Dilihat dari fungsinya saja, DJB sebagai bank sirkulasi sama fungsinya dengan 'Bank Indonesia' yang disebutkan dalam UUD 1945 (Hidayat A, 2020).

Walaupun telah mengalami proses nasionalisasi jajaran staff yang ada dalam kepengurusan De Javasche Bank masih dipenuhi oleh orang – orang Belanda, walaupun Presiden utama sudah digantikan orang Indonesia yaitu Syafrudin Prawiranegara. Wakil – wakil Direktur masih dijabat oleh orang Belanda. Penasihat, Dewan Komisaris, dan Direktur Muda pun masih diwarnai nama – nama orang Belanda dalam jajarannya. Begitu pula kantor cabang di Indonesia yang semua direktornya masih orang – orang Belanda. Hal ini mungkin disebabkan karena belum selesainya proses nasionalisasi yang masih dalam tahap penyusunan RUU. Kurangnya tenaga kerja yang berpengalaman dalam bidang perekonomian juga bisa menjadi faktor penyebab kurangnya tenaga kerja Indonesia dalam jajaran kepengurusan DJB (Sudirman, 2014).

Dua bulan setelah mundurnya Kabinet Wilopo terbentuk kabinet baru yaitu Kabinet Ali Sastroamidjojo I (31 Juli 1953 -12 Agustus 1955). Kabinet Ali mendapat dukungan dari PNI dan NU, sedangkan Masyumi memilih sebagai oposisi. Kabinet Ali mempunyai program 4 pasal yaitu Program dalam negeri antara lain meningkatkan keamanan dan kemakmuran segera diselenggarakan pemilihan umum. Pembebasan Irian Barat secepatnya. Program luar negeri antara lain pelaksanaan politik bebas-aktif dan peninjauan kembali Persetujuan KMB. Dan penyelesaian pertikaian politik (Hatta, 2008).

Kabinet Ali Sastroamidjojo 1 adalah kabinet ke 4 setelah kabinet Wilopo, Ali berusaha menanggulangi kekacauan ekonomi yang terjadi di Indonesia dengan menempuh kebijakan ekonomi Ali Baba. Sistem ekonomi Ali-Baba diprakarsai oleh menteri perekonomian kabinet Ali Sastroamidjojo 1 yaitu Iskaq Tjokrohadisurjo. Menurut Iskaq dalam rangka memajukan ekonomi Indonesia perlu adanya kerja sama antara pengusaha pribumi dan non pribumi. Sistem ekonomi Alibaba merupakan penggalangan kerjasama antara pengusaha Cina dan pengusaha pribumi. Pengusaha non pribumi diwajibkan memberikan pelatihan-pelatihan kepada pengusaha pribumi. Pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi pengusaha swasta nasional (Nalenan, 1982)

Kedekatan hubungan antara Indonesia dan Cina juga mulai terjalin baik pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo 1 tahun 1953-1955 hal ini terbukti dengan pengiriman duta besar pertama Peking ke Jakarta yaitu Wang Renshu dan pengiriman seorang elite Indonesia ke Peking yaitu Arnold Mononutu.

Di Cina kebijakan Rencana 5 Tahun pertama Cina memperoleh keberhasilan karena mampu menasionalisasikan kembali perekonomian di negara tersebut. Hal ini menjadi inspirasi bagi kabinet Ali Sastroamidjojo 1 untuk menetapkan kebijakan Alibaba. Kebijakan Alibaba ditetapkan karena mayoritas sistem perekonomian yang ada di Indonesia pada masa itu adalah dikuasai oleh pengusaha asal Cina. Sehingga ditetapkan kebijakan Alibaba. Orang pribumi yang mempunyai ijin usaha dikenal dengan istilah Ali sedangkan Cina yang menjalankan perusahaan disebut Baba. Kebijakan ini bertujuan untuk memajukan pengusaha

pribumi, agar para pengusaha pribumi bekerjasama untuk memajukan ekonomi nasional. Pada prakteknya setiapseorang Baba diwajibkan memberikan pengajaran kepada 2 orang pengusaha pribumi. Pertumbuhan dan perkembangan pengusaha swasta nasional pribumi dalam rangka merombak ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional (Pujoalwanto, 2014).

Berdasarkan kedekatan hubungan antara Indonesia dan Cina, banyaknya pengusahaCina yang menguasai perindustrian di Indonesia, dan persamaan antara negara Indonesia dan Cina tersebut, maka penulistertarik untuk melakukan penelitian mengenai kebijakan ekonomi yang terjadidi Indonesia dan Cina yaitu Kebijakan Alibaba di Indonesia dan Kebijakan Ekonomi Rencana 5 Tahun Pertama diCina. Orang pribumi yang mempunyai ijinusaha dikenal dengan istilah Alisedangkan Cina yang menjalankan perusahaan disebut Baba. Kebijakan ini bertujuan untuk memajukan pengusaha pribumi, agar para pengusaha pribumi bekerjasama untuk memajukan ekonomi nasional. Pertumbuhan dan perkembanganpengusaha swasta nasional pribumi dalam rangka merombak ekonomi kolonialmenjadi ekonomi nasional (Pujoalwanto, 2014).

Namun keadaan yang terjadi pada pelaksanaan Ali-baba saat itu para pengusaha asing malah menguasai lisensi impor, mendapat kemudahan dalam kontrak dan pencairan kredit, dengan tidakmelibatkan pengusaha pribumi di dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, umumnya yang menjalankan usaha-usahatersebut adalah golongan Cina. Tentu sajahal ini merugikan pihak pribumi, karena yang mendapatkan keuntungan besar adalah orang Cina (Nalenan, 1982).

Kenyataan yang terjadi ternyata tidaksesuai yang di harapkan, keinginan untuk memajukan pengusaha pribumi, agar para pengusaha pribumi dan non pribumi bekerjasama untuk memajukan ekonomi nasional tidak berjalan denganbaik, bahkan perusahaan China semakin maju tanpa melibatkan masyarakat pribumi (Wijayanti, 2015).

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian historis. Penelitian historis sendiri menurut Nugroho Notosusanto adalah “Sekumpulan prinsip atau aturan yang sistematis yang dimaksudkan untuk memberikan bantuan secara efektif dalamusaha mengumpulkan bahan-bahan bagi sejarah, menilai secara kritis dan kemudian menyajikan suatu sintesa dari pada hasil-hasilnya dalam bentuk tertulis”(Notosusanto, 1984).

Selanjutnya Nograho Notosusantomembagi penelitian sejarah ke dalamempat langkah yaitu Heuristik, yaitu pengumpulan sumber-sumber data. Kritik, yaitu menyelidiki keaslian dan keabsahansumber-sumber data yang di dapat. Interpretasi, yaitu merangkai berbagai sumber-sumber data yang telah di kritik menjadi satu kesatuan agar menerangkan objek penelitian. Historiografi, yaitutahap penulisan hasil penelitian (Notosusanto, 1984).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keadaan Perekonomian Indonesia Sebelum 1953-1955

Ciri ekonomi Indonesia yang menonjoldpada 1950 an bersifat dualistik yang menampilkan perpecahan cukup tajam antara sektor ekonomi modern dan pertanian tradisional yang subsisten. Sektor modern yakni industri mayoritas dikuasai oleh

perusahaan Belanda. Kolonialisme juga menumbuhkan kesadaran bahwa tanah yang dieksploitasioleh penjajah dipergunakan untuk kesejahteraan kolonial (penjajah) dan bukan untuk tanah yang dijajah. Tumbuhnya kesadaran tersebut merupakan bagian dari rasa nasionalisme berbangsa. Saat nasionalisme menemukan bentuknya dalam negara bangsa, republik pascaproklamasi kemerdekaan 1945 ternyata tidak mudah melepaskan diri daricengkeraman kepentingan ekonomi Barat.

Proses nasionalisasi ini dimulai saat usainya Konferensi Meja Bundar pada 1949 yang menghasilkan salah satu kesepakatan adanya nasionalisasi terhadap perusahaan milik negara, termasuk perusahaan kereta api negara Belanda (Staatspoor), di samping kesepakatan lain seperti penyerahan Irian Barat setahun kemudian serta diizinkan orang-orang Belanda untuk berbisnis kembali di Indonesia. Kemudian mencapai puncaknya pada tahun 1958 bersamaan dengan munculnya UU No. 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan Milik Belanda. Kebijakan ini menjadi cikal bakal perusahaan negara yang kini dikenal sebagai Badan Usaha Milik Negara (Wardodjo, 2018).

2. Hubungan Luar Negeri Indonesia dan Cina

Hubungan yang terbangun dengan Tiongkok ditandai dalam siklus pasangsurut. Pada Januari 1950, Mohammad Hatta, yang saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri, mengungkapkan niat pemerintahannya untuk membuka hubungan diplomatik dengan Tiongkok. Ia mengusulkan bahwa Beijing harus lebih dahulu mengakui Jakarta karena RRT didirikan sebelum Republik Indonesia. Pada 26 Januari, Mao Tse Tung mengirim telegram kepada Liu Shaoqi. Liu diminta untuk membuka hubungan diplomatik. Pada Mei 1950, Zhou Enlai, Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri, sepakat untuk mengirim Wang Renshu sebagai Duta Besar pertamake Jakarta (Liu, 2015). Dalam praktiknya duta besar Cina akan menekan orang-orang Cina untuk bekerja sama dengan pribumi, tapi keadaannya tidak demikian. Sedangkan pada saat itu Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi.

Tetapi hal tersebut tidak bersambut baik ketika pemerintahan Hatta digantikan oleh kabinet Natsir yang anti-komunis. Kesempatan yang menguntungkan bagi Beijing untuk memperbaiki hubungan dengan Jakarta mulai muncul setelah Juni 1953, menyusul terbentuknya sebuah kabinet baru yang dipimpin oleh Ali Sastroamidjojo. Tidak seperti pemerintah Indonesia sebelumnya, kabinet Alisebenarnya bergantung pada dukungan parlementer, dukungan mayoritas dari Partai Komunis Indonesia (PKI). PKI dapat memainkan peran kunci ini karena pemerintahan Ali didasarkan pada koalisi lemah yang dipimpin oleh sayap kiri PNI. Supaya dapat memegang mayoritas yang bekerja tetapi mengecualikan partai Islam konservatif, membutuhkan dukungan parlemen dari ekstrem kiri dan hal tersebuthanya dapat diberikan oleh PKI (Mazingo, 1976).

Langkah pertama yang diambil kabinet Ali untuk memperbaiki hubungan dengan China adalah mengirim seorang anggota elit Indonesia yang terkenal, Arnold Mononutu, sebagai duta besar pertama ke Peking pada Oktober 1953. Hubungan ekonomi selanjutnyadiexplorasi dan pada bulan Desember 1953 sebuah perjanjian perdagangan dua tahun Sino-Indonesia ditanda tangani. Peking menanggapi perkembangan yang menggembirakan ini pada bulan November 1954 dengan mengirim, sebagai duta besar barunya ke Jakarta, Huang Chen, seorang perwira diplomatsenior yang sebelumnya diposkan di Eropa Timur. Pada akhir 1954 hubungan diplomatik penuh telah tercapai. Saatnya sudah matang untuk dua kekuatan untuk

mempertimbangkan masalah politik substantif yang sebelumnya tidak dapat mereka bahas, apalagi bernegosiasi (Mozingo, 1976).

Negara Indonesia dan Cina memiliki kesamaan cita-cita yaitu menghapus penindasan dan menciptakan keadilan sosial. Bangsa Tiongkok dan bangsa Indonesia memiliki banyak kesamaan. Cita-cita Cina adalah membangun dunia baru yang bebas dari eksploitasi, penderitaan, dan penindasan dunia dengan kehidupan rakyat yang bebas dan bahagia. Seperti itu pulalah cita-cita bangsa Indonesia. Hal ini diucapkan Sukarno pada saat kunjungannya ke Tiongkok.

Kedekatan hubungan antara Cina dan Indonesia yang mulai terbangun sejak tahun 1950. Hal ini diperkuat dengan pengiriman duta besar Indonesia ke Peking pertama kali pada masa kabinet Ali Sastroamidjojo 1 yaitu Arnold Mononutu. Lalu pengiriman duta besar dari Cina ke Jakarta pertama kali yaitu Wang Renshu. Kedekatan hubungan antara kedua negarainilah yang mempermudah proses duplikasi kebijakan Cina yaitu Kebijakan Repelita 1 kepada Kebijakan Alibaba di Indonesia.

Hubungan ekonomi selanjutnya dieksplorasi dan pada bulan Desember 1953 sebuah perjanjian perdagangan dua tahun Sino-Indonesia ditanda tangani. Peking menanggapi perkembangan yang menggembirakan ini pada bulan November 1954 dengan mengirim, sebagai duta besar barunya ke Jakarta, Huang Chen, seorang perwira diplomasi senior yang sebelumnya diposkan di Eropa Timur (Mozingo, 1976).

Cina membidik tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan menitikberatkan pada pengembangan industri berat, termasuk aset-aset seperti pertambangan, manufaktur besi, dan manufaktur baja. Cina lebih memfokuskan kebijakan Repelita 1 di bidang industri karena dinilai industri Cina pada masa itu dikuasai oleh asing (Oktasari, 2016).

Hal ini juga terjadi di Indonesia dimana industri di Indonesia didominasi oleh pengusaha non-pribumi (Cina). Bagi para importir nasional disediakan 80-90% dari lisensi devisa. Caranya ialah, memberi kesempatan kepada pengusaha pribumi melalui bantuan kredit. Upaya ini diharapkan menciptakan kelas pengusaha pribumi yang mampu meningkatkan produktivitas barang dan modal domestik (Muhaimin, 1991).

Kebijakan Repelita 1 yang berlaku di Cina memilih mengikuti model pembangunan ekonomi Soviet, yang menekankan industrialisasi yang pesat melalui investasi di industri berat. Tidak mengherankan, Rencana Lima Tahun pertama menampilkan model ekonomi gaya komando Soviet yang dicirikan oleh kepemilikan negara, kolektif pertanian, dan perencanaan ekonomi terpusat.

Pemerintah Cina perlu menasionalisasi industri agar mereka dapat memusatkan modal dalam proyek-proyek industri berat. Untuk memperoleh modal, pemerintah China menasionalisasi sistem perbankan dan menerapkan kebijakan pajak dan kredit yang diskriminatif, menekan pemilik bisnis swasta untuk menjual perusahaan mereka atau mengubahnya menjadi urusan publik-swasta bersama (Oktasari, 2016).

Hal ini juga dilakukan di Indonesia Pemerintah Indonesia menasionalisasikan sistem perekonomian dengan peralihan aset ekonomi yaitu peralihan kelembagaan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah RI dan nasionalisasi. Seperti nasionalisasi DJB dan memberikan pinjaman kepada pengusaha-pengusaha pribumi agar perekonomian tidak dikuasai oleh pengusaha Cina. Pemerintah mewajibkan setiap 1 orang pengusaha Cina harus memberikan pengajaran kepada pengusaha pribumi. Pemerintah memberikan kredit lisensi bagi para pengusaha pribumi untuk menasionalisasikan sistem perekonomian Indonesia masa itu.

Pada pelaksanaan kebijakan Repelita 1 di Cina yang meniru dari gaya Soviet

dalam hal ini Uni Soviet mendanai banyak proyek industri berat China, bantuan Soviet datang dalam bentuk pinjaman yang, tentu saja, harus dibayar kembali oleh China (Oktasari, 2016).

Namun pada pelaksanaannya di Indonesia pada masa itu Indonesia berjuang sendiri di tengah perekonomian Indonesia yang kurang baik karena peralihan dari sistem perekonomian kolonial menuju nasional (Wilopo, 1976).

Mayoritas penduduk yang petani dan sektor industri di kuasai non-pribumi juga menjadi faktor perekonomian Indonesia kurang baik dan hasil akhirnya yaitu kebijakan Alibaba di Indonesia mengalami kegagalan berbeda dengan kebijakan Repelita 1 yang mengalami keberhasilan. Untuk memperoleh modal, pemerintah China menasionalisasi sistem perbankan dan menerapkan kebijakan pajak dan kredit yang diskriminatif, menekan pemilik bisnis swasta untuk menjual perusahaan mereka atau mengubahnya menjadi urusan publik-swasta bersama (Oktasari, 2016).

Hal ini juga dilakukan di Indonesia untuk mengsucceskan kebijakan Alibaba. Kebijakan ekonomi Alibaba menekankan Indonesianisasi perekonomian dan memberi dorongan kepada para pengusaha pribumi, karena pada saat itu perekonomian khususnya dibidang industri mayoritas dikuasai oleh pengusaha asing. Kebijakan ini juga mewajibkan 1 orang pengusaha asing memberikan pengajaran kepada 2 orang pengusaha pribumi (Riawan, 2010).

Pemerintah China berupaya memodernisasi metode pertanian negara itu. Pada kebijakan Repelita 1 tahun 1950 ditetapkan kebijakan Sentralisasi Pajak yaitu pajak pertanian, pajak komoditi, dan berbagai pajak industri serta komersial wajib diserahkan kepada pemerintah pusat (Oktasari, 2016).

Hal ini tidak dilakukan di Indonesia, Menteri Iskaq mengeluarkan sebuah surat edaran yang menyatakan bahwa bagi para importir nasional disediakan 80-90% dari lisensi devisa. Program ini diwujudkan dengan adanya hak-hak istimewa lainnya yang diberikan kepada importir Indonesia dalam bentuk alokasi lisensi devisa (Muhaimin, 1991).

1. Persamaan Kebijakan Ekonomi Rencana Lima Tahun Pertama Cina Dan Kebijakan Ekonomi Alibaba Pada Sektor Pertanian.

Politik hukum pertanian di era orde lama dan orde baru menyisakan beban yang besar bagi pemerintah di era reformasi. Hal ini mengingat banyak persoalan di bidang pertanian yang merupakan peninggalan dari kebijakan pertanian di kedua era tersebut. Di era orde lama, fokus utama politik hukum pertanian diarahkan kepada upaya-upaya untuk Nasionalisasi perkebunan Belanda, Meningkatkan produksi pangan dengan jalan membentuk program dan mengintensifkan program penyuluhan melalui Balai Pendidikan Masyarakat Desa (BPMD) dan Penyelesaian sengketa lahan pertanian yang kemudian diprogramkan menjadi landreform. Pemerintah di era orde lama lanjutan merumuskan program Berdiri di Atas Kaki Sendiri (BERDIKARI) yang direalisasikan melalui program pemerataan kemakmuran rakyat dengan landreform yang diinisiasi melalui penerbitan Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) beserta peraturan pelaksanaannya dan Melaksanakan program Rencana Kemakmuran Istimewa (RKI) yang ditujukan untuk mengembangkan sektor pertanian dengan cara mengembangkan cara-cara baru dalam teknik usaha tani, membangun kelembagaan penunjang sarana produksi, dan lainnya. Sayangnya, program tersebut tidak berjalan efektif (Wiradi, 2005 : 8)

Pada Kebijakan Ekonomi Rencana 5 Tahun Pertama Cina Pemerintah mendorong petani untuk mengumpulkan pertanian mereka untuk mengontrol harga dan distribusi barang pertanian. Walau akibatnya mereka mampu menjaga harga pangan tetap rendah bagi pekerja perkotaan, perubahan tersebut tidak meningkatkan produksi biji-bijian secara signifikan.

Pada tahun 1950 ditetapkan kebijakan Sentralisasi Pajak yaitu pajak pertanian, pajak komoditi, dan berbagai pajak industri serta komersial wajib diserahkan kepada pemerintah pusat. Pada sektor pertanian maupun industri mengalami kenaikan. Pendapatan Nasional Kotor (GNP) dan Produksi modern di Cina juga mengalami peningkatan yang besar (Oktasari, 2016 : 56).

2. Persamaan Kebijakan Ekonomi Rencana Lima Tahun Pertama Cina Dan Kebijakan Ekonomi Alibaba Pada Sektor Perindustrian.

Kabinet Ali Sastroamidjojo juga bergerak dalam perindustrian, yaitu memajukan pendirian industri nasional yang bertujuan agar secepat mungkin Republik Indonesia dapat menjamin kebutuhan sendiri dan dapat melindungi industri nasional dari persaingan asing. Selain itu, pembangunan industri dikarenakan struktur ekonomi Indonesia masih berdasarkan agrarian. Oleh karena itu perekonomian Indonesia harus dimajukan dengan sedemikian rupa, sehingga dapat menjadi dasar yang kuat untuk Indonesia memproduksi sendiri, memajukan industri ini sangat diperlukan untuk mencapai keseimbangan ekonomi.

Untuk memenuhi program kerja tentang perkembangan industri, pemerintah mendirikan beberapa perusahaan besar, diantaranya membuka pabrik soda dan chlor di Waru, membuka pabrik semen di Gresik pada Mei, membuka pabrik pemintalan di Cilacap, membuka pabrik pemintalan di Semarang, dan juga membuka pabrik pemintalan di Pematang Siantar Medan. Dengan adanya industri-industri besar tersebut, diharapkan kebutuhan primer bangsa Indonesia tidak lagi tergantung dari luar negeri. Dalam hal ini pakaian adalah yang terpenting, sehingga pembangunan industri tekstil mendapat perhatian yang khusus, baik dalam hal pemintalan maupun pertenunan, finishing atau tricotage.

Dalam usaha pembangunan ekonomi serta mengurangi ketergantungan Indonesia pada luar negeri dalam hal kebutuhan barang-barang pokok, pembangunan pabrik rabuk, sebagian besar kehidupan masyarakat Indonesia mempunyai tempat yang utama dalam rangkaian kerja pemerintah. Dalam hal ini pemerintah terus berusaha ke arah pembangunan dan berusaha membantu kegiatan-kegiatan masyarakat yang berusaha memajukan ekonomi. Diantara rencana pemerintah yang telah mempunyai bentuk nyata adalah penyempurnaan dan melengkapi pabrik fosfat dengan produksi kurang lebih sebesar 5.000 ton setahun dengan target produksi 30.000 ton tiap tahunnya, pembangunan pabrik urea di Sumatera Selatan dengan target produksi 100.000 ton tiap tahun.

Untuk melindungi industri dalam negeri terhadap persaingan barang impor, pemerintah Republik Indonesia mengadakan pemungutan Tambahan Pembayaran Impor (T.P.I) yang lebih tinggi untuk barang-barang. Hal ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan Tambahan Pembayaran Impor (T.P.I) untuk bahan-bahannya, atau hanya diimpor jika completely knocked down. Untuk mengurangi kesukaran perusahaan-perusahaan industri dan pembayaran uang muka, pemerintah Indonesia melakukan penundaan pembayaran Tambahan Pembayaran Impor (T.P.I) sampai

adanyadokumenten. Selain dalam bidang Perindustrian, pertambangan juga menjadi sektor tersendiri, yang juga memberikan peran dalam menambah produksi dalam negeri. Dalam urusan pertambanganproduksi yang terpenting adalah minyak, yang didirikan oleh perusahaan- perusahaan minyak asing, seperti NV, BPM, SVPM CPPM, dan juga perusahaancampuran antara pemerintah dan BPM seperti, NV, NIAM (Widya Citra, 2020 : 69).

Pada kebijakan ekonomi Rencana 5 Tahun Pertama Cina membidik tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi denganmenitikberatkan pada pengembangan industri berat, termasuk aset-aset seperti pertambangan, manufaktur besi, danmanufaktur baja. Mengalihkan fokus ekonomi negara dari pertanian dan beralihke teknologi (seperti konstruksi mesin). pemerintah China memilih mengikuti model pembangunan ekonomi Soviet,yang menekankan industrialisasi yangpesat melalui investasi di industri berat. Pemerintah Cina perlu menasionalisasi industri agar mereka dapat memusatkan modal dalam proyek-proyek industriberat.

Banyak pabrik dan fasilitas gedung dibuka, meningkatkan produksi industri19% setiap tahun antara tahun 1952 dan 1957. Rencana Lima Tahun telah diimplementasikan secara terus menerus di Cina. Rencana Lima Tahun PertamaChina (1953-57) memiliki strategi dua cabang. Tujuan pertama adalah membidik tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggidengan menitikberatkan pada pengembangan industri berat, termasuk aset-aset seperti pertambangan, manufaktur besi, dan manufaktur baja. Tujuan kedua adalah mengalihkan fokus ekonomi negara dari pertanian dan beralih ke teknologi (seperti konstruksimesin). Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah China memilih mengikuti model pembangunan ekonomi Soviet, yang menekankan industrialisasi yangpesat melalui investasi di industri berat(Ririn Darini, 2010 : 45).

IV. PENUTUP

Berdasarkan data-data yang telahdiperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Ekonomi Rencana 5 Tahun Pertama Cina memiliki persamaan dengan Kebijakan Ekonomi Ali-baba. Dalam penelitian ini beberapa sektor ekonomi yang diteliti antara yaitu pertanian dan perindustrian pada kebijakan Rencana 5Tahun Pertama Cina dan Kebijakan Alibaba.

Kebijakan di Indonesia dan Cina memiliki banyak kesamaan di antaranya kesamaan pada cita-cita yaitu menghapus penindasan dan mewujudkan keadilan sosial. Selain itu Cina memiliki ide pemerintahan denganmobilisasi rakyat Tiongkok yang membawa pada kemajuan ekonominya. Sistem perekonomian yang mayoritas pertanian klasik dan industri sederhana di Cina juga merupakan kesamaan dengan sistem perekonomian Indonesia masa itu. Terlebih lagi negara Indonesiamemiliki kedekatan hubungan luar negeri dengan Cina.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Darini, Ririn. 2010. "Garis Besar Sejarah Era Mao", dalam makalah Universitas Negeri Yogyakarta.
- Gunawan Wiradi, Politik Pertanian/Agraria di Indonesia Dari Masa Ke Masa, hlm.8 diakses melalui <http://kpa.or.id/publikasi/download/a86da-gwr-2005-politik-agraria-di-indonesia-dari-masa-ke-masa.pdf>
- Hatta, M. (2008). Demokrasi kita: dan pikiran-pikiran tentang demokrasi dan kedaulatan rakyat. Segi Arsy.
- Hidayat, A., & Hidayat, F. (2020). Dinamika Nasional De Javasche Bank: Sebuah Perjuangan Menjadi Bank Indonesia (1950-1953).
- Liu, H. (2015). Sukarno, Tiongkok dan Pembentukan Indonesia 1949- 1965. Jakarta: Komunitas Bambu. Hal: 184-236
- Muhaimin, Y. (1990). Bisnis dan politik: kebijaksanaan ekonomi Indonesia 1950-1980. LP3ES. Hal 81
- Mozingo, D. (2007). Chinese policy toward Indonesia, 1949-1967. Equinox Publishing. Hal : 113-114
- Nalenan, Ruben. 1982. Iskaq Tjokrohadisurjo. Jakarta. Gunung Agung. Hal 138.
- Notosusanto, N. (1984). Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer, Jakarta. Idayu Pres.
- Oktasari, W. (2016). Peran Mao Zedong Dalam Perekonomian Cina 1949-1960. Prodi. Pendidikan Sejarah, FKIP, Universitas PGRI Yogyakarta.
- Pujoalwanto, Basuki. 2014. Perekonomian Indonesia. Yogyakarta. Graha Ilmu. Hal 40.
- RIAWAN, Y. H. U. Kebijakan Politik RI Masa Demokrasi Liberal 1950-1959.
- Sakirman. 1954. Djalan Keluar Dari Krisis Ekonomi. Jakarta. Jajasan Pembaruan.
- Setiawan, Johan. 2018. Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pada Masa Demokrasi Liberal Tahun 1950-1959. Jurnal Hostoria Vol 6. No 2. Hal 367.
- Indonesia, B. (2005). Sejarah Bank Indonesia periode II: 1959-1966, Bank Indonesia pada masa ekonomiterpimpin. Jakarta: Bank Indonesia.
- Sudirman, A. (2014). Sejarah Lengkap Indonesia. Diva Press. Diva Press. Hal 374.
- Wardodjo, W. W. (2019). Ekonomi Indonesia Tahun 1950-an dan Penguasaan Negara terhadap Perusahaan Kereta Api Pasca KMB 1949. Indonesian Historical Studies, 2(2), 96-106.
- Wijayanti, Y. (2019). Kebijakan Pemerintah Indonesia Masa Orde Lama Dibidang Ekonomi Terhadap Bisnis Orang Cina. Jurnal Artefak, 3(2), 113-118.
- Widya, Citra. 2020. "Sistem Perekonomian Demokrasi Liberal Dan Tercapainya Pemilihan Umum 1 Pada Tahun 1955 Di Indonesia". Jurnal Undiksha, Vol 2. Hal 69-85.